

EVALUASI PROYEK PERHUTANAN SOSIAL
DAN ANALISIS OPTIMALISASI USAHATANI TUMPANGSARI
DI RESORT PEMANGKUAN HUTAN (RPH) NGANTEPAN
KPH NGAWI JAWA TIMUR

Oleh :

Achmad Rochani *)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Pitu merupakan salah satu desa dari sekitar 6000 desa di Indonesia yang terletak di tepi hutan, dan yang berbatasan dengan areal hutan. Letaknya di kawasan hutan BKPH Getas KPH Ngawi. Sebagaimana kebanyakan desa-desa di sekitar hutan di daerah lain, desa Pitu dicirikan oleh rendahnya kesadaran dan taraf hidup penduduk sebagai akibat demografis serta pemilikan lahan yang sempit.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata pemilikan lahan pertanian di desa Pitu berkisar 0 - 0.5 hektar setiap keluarga. Sebagian besar lahan (91.5 persen) berupa lahan kering/tegalan, sawah tadah hujan dan pekarangan yang produktivitasnya rendah, dan hanya sebagian kecil (8.5 persen) berupa sawah beririgasi setengah teknis. Disamping itu, distribusi pemilikan tanahpun tidak merata, bahkan sebagian besar dari mereka tidak mempunyai lahan sama sekali. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa tingkat pendapatan mereka sangat rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum. Mereka yang tergolong tuna wisma dan tidak berkesempatan mengerjakan lahan milik orang lain, dan mereka yang mempunyai lahan garapan sempit tanpa ada sumber pendapatan lain, menjadikan sumberdaya hutan sebagai tumpuan bagi

*) Mahasiswa S2 Fakultas Pasca Sarjana IPB di bawah bimbingan Dr Ir Bungaran Saragih, MSc ; Dr Ir Mangara Tambunan, MSc ; Dr Ir Junus Kartasubrata dan Dr Larry A Fisher.

kelangsungan hidup keluarganya. Seringkali mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara seperti pencurian kayu, perencekan secara berlebihan, penyerobotan tanah, penggembalaan liar dan sebagainya.

Terdapatnya tekanan sosial ekonomi terhadap sumberdaya hutan di atas mengakibatkan turunnya produktivitas lahan dan fungsi hutan maupun kualitas lingkungan.

Perum Perhutani sebagai suatu lembaga yang mengelola hutan di Pulau Jawa telah mencoba beberapa cara pendekatan antara lain dikenal dengan nama-nama : prosperity approach, MALU, dan terakhir pada tahun 1982 dengan PMDH. Kegiatan-kegiatan tersebut disamping masih kurang atau terbatas, juga belum dapat menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kegiatan tumpangsari yang ada, meskipun hasilnya cukup memadai, namun waktu yang hanya sekitar 2-3 tahun tidak memberikan jaminan sumber pendapatan yang berkesinambungan dan mendorong investasi untuk meningkatkan produksi.

Bertolak dari kenyataan di atas, dalam rangka meningkatkan pembinaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan serta keikutsertaannya secara sadar menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan yang berlandaskan partisipasi atas dasar "mitra sejajar", maka sejak akhir tahun 1986 telah dilaksanakan pilot project Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan BKPH Getas yang termasuk ke dalam wilayah desa Pitu. Proyek ini mendapat bantuan dari Yayasan Ford dan dilaksanakan secara lintas sektoral (terpadu).

Program Perhutanan Sosial adalah dalam rangka pengelolaan hutan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan Perum Perhutani. Ini memberikan pengertian, bahwa pelaksanaan program Perhutanan Sosial mengakibatkan perubahan baik penggunaan input, output dan pola tumpangsari yang dilakukan petani. Sekarang permasalahannya ialah, sampai sejauh mana perubahan itu terjadi, dan apakah perubahan itu telah mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai ? Untuk menjawab permasalahan tersebut di ataslah maka penelitian ini dilakukan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk mengevaluasi pelaksanaan Proyek Perhutanan Sosial Di RPH Ngantepan, dan menganalisis efisiensi usahatani tumpangsari yang dilakukan petani peserta proyek. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menelaah apakah proyek Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan merupakan kegiatan yang layak, baik dari segi ekonomi maupun finansial.
2. Menganalisis apakah alokasi sumberdaya pada kegiatan usahatani yang sedang dilakukan petani peserta proyek pada kondisi yang optimal.
3. Mencari pola usahatani tumpang-sari yang optimal pada lokasi Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan kasus adalah pilot project Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan BKPH Getas KPH Ngawi. Unit analisa penelitian adalah keluarga petani peserta proyek dan bukan peserta. Pengambilan data dilakukan secara sensus untuk petani peserta proyek, dan untuk petani bukan peserta diambil secara acak sebanyak 50 % dari 50 keluarga yang terdapat disekitar proyek.

Metode analisa digunakan cara membandingkan keadaan dengan proyek dan tanpa proyek ("with and without method"). Dengan cara ini, maka dalam penelitian ini ada dua sumber data primer. Pertama, petani peserta proyek, dan kedua petani yang tidak ikut dalam kegiatan proyek.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara bebas, observasi partisipasi dan wawancara berstruktur terhadap keluarga petani peserta dan bukan peserta. Data sekunder diambil dari publikasi-publikasi dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

Pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan komputer. Data disajikan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan pengolahan selanjutnya. Untuk menilai kelayakan proyek digunakan analisa DCF, analisa usahatani dan analisa perprograman linier.

HASIL PENELITIAN

Lokasi Pilot Project

Pilot Project Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan terletak di dalam kawasan hutan BKPH Getas, yang mencakup

areal seluas kurang lebih 13.0 hektar. Terletak berdekatan dengan pemukiman penduduk, kurang lebih 40 meter dari jalan beraspal. Topografi di areal proyek datar sampai miring dengan kemiringan hingga mencapai 30 persen. Areal ini dulunya merupakan bekas tebangtan tanaman jati sekitar tahun 1970-an. Selama ini telah dilakukan beberapa kali usaha reboasasi dan penanaman kembali namun selalu gagal. Selain disebabkan oleh gangguan manusia, juga disebabkan oleh keadaan tanahnya yang kurang menguntungkan. Dengan program Perhutanan Sosial ini, areal ini dan juga areal sekitarnya direncanakan untuk dijadikan kelas hutan rimba dengan tanaman johar sebagai tanaman pokok. Apabila lokasi ini berhasil, maka akan diikuti oleh petak-petak lain disekitarnya.

Jenis tanah di areal proyek ini adalah tanah berwarna hitam sampai putih keabu-abuan, berkapur dan banyak mengandung batu-batu. Dibandingkan dengan lokasi proyek Perhutanan Sosial di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, kondisi tanah di proyek RPH Ngantepan sebenarnya sedikit lebih baik, namun karena karena penanganannya belum intensif maka keberhasilannya dinilai relatif masih rendah.

Kelompok Tani Hutan (KTH)

Jumlah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) di lokasi pilot project Perhutanan Sosial RPH Ngantepan (petak 85) tercatat sebanyak 52 orang, yang terbagi ke dalam empat kelompok tani hutan, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Seluruh anggota kelompok berasal dari desa Pitu, tepatnya dari dusun Ngambong, dan hanya satu anggota kelompok berasal dari luar desa Pitu.

Anggota KTH adalah merupakan kepala keluarganya. Sebagai kepala keluarga, sering dianggap sebagai manajer utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya, termasuk kegiatan-kegiatan dalam keikutsertaannya di dalam program Perhutanan Sosial. Keputusan-keputusan yang diambil akan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan usahanya. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, antara lain ditentukan oleh umur dan tingkat pendidikan baik formal maupun informal.

Bila ditinjau dari segi umur, dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota KTH masih dalam usia kerja. Keadaan ini cukup menguntungkan. Tetapi apabila dilihat dari segi pendidikan, baik formal maupun informal kondisinya kurang menguntungkan. Sebagian besar dari anggota KTH (60 persen) tidak pernah memperoleh pendidikan formal. Sedangkan sisanya (40 persen) maksimal hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Pendidikan

informal seperti kursus tani dan semacamnya yang diharapkan dapat membantu anggota KTH dalam menjalankan usahanya, tampaknya tidak dapat banyak memberikan harapan. Hampir seluruh anggota KTH (90 persen) tidak pernah mendapat kursus.

Lahan merupakan modal pokok dalam melakukan kegiatan pertanian. Oleh karena itu penguasaan lahan adalah sangat penting bagi petani. Dari hasil pengamatan, tampaknya ada kaitan yang erat antara penguasaan lahan pertanian dengan keikutsertaannya di dalam program Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan. Semakin luas lahan pertanian yang dikuasai, terutama lahan sawah maka makin kecil keikutsertaannya. Berdasarkan struktur pemilikan lahan pertanian, anggota KTH dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan ; 1) anggota KTH yang tidak mempunyai lahan atau yang berstatus buruh tani sebanyak 52.3 % , 2) anggota KTH yang mempunyai lahan sempit (kurang dari 0.5 hektar) sebanyak 36.4 persen, dan 3) anggota KTH yang mempunyai lahan lebih dari 0.5 hektar sebanyak 11.3 persen.

Pada dasarnya setiap anggota KTH menggarap lahan seluas satu "andil" atau 0.25 hektar. Namun demikian, disamping mereka menggarap lahan di lokasi pilot project Perhutanan Sosial, mereka juga menggarap lahan tumpangsari di petak-petak yang lain (lahan bukaan rutin). Rata-rata setiap anggota KTH , menggarap tiga andil, yang terdiri dari satu andil pada pilot project Perhutanan Sosial dan dua andil pada areal bukaan rutin. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja yang tersedia, dan walaupun ada mereka kurang tertarik untuk ikut dalam kegiatan tumpangsari.

Di dalam mengusahakan lahan di pilot project Perhutanan Sosial setiap anggota KTH memperoleh bantuan kredit/subsidi dari Perum Perhutani berupa peralatan, bibit, pupuk dan obat-obatan. Setelah panen mereka diwajibkan mengembalikan 100 persen bibit dan 50 persen pupuk yang mereka terima.

Proyek ini diperkirakan akan berjalan selama 25 - 30 tahun sesuai dengan daur hidup tanaman johar sebagai tanaman pokok. Sedangkan kegiatan tumpangsari untuk tanaman bahan makanan atau palawija, berdasarkan kenyataan di lapang diperkirakan dapat dilakukan selama lima tahun. Setelah itu anggota KTH dapat mengambil hasil dari tanaman buah-buahan, obat-obatan dan hijauan ternak, dengan catatan kayunya menjadi milik Perum Perhutani. Untuk mengatur pelaksanaannya, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian/kontrak yang dapat diperpanjang setiap dua tahun. Pelaksanaan di lapang,

kelompok tani hutan dibimbing oleh seorang petugas lapangan Perhutanan Sosial (PLPS) dibantu oleh seorang mandor.

Walaupun pilot project Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan telah berjalan selama dua tahun, dan sekarang telah memasuki tahun ketiga, tetapi tampaknya pola pendekatan masyarakat yang diterapkan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Keanggotaan KTH masih belum stabil

Keanggotaan KTH selama waktu yang berjalan menunjukkan belum stabil. Beberapa anggota KTH mengalami pergantian beberapa kali. Dari 52 anggota KTH yang terdaftar pada perjajanjian kontrak yang pertama dan terbagi menjadi 4 kelompok, 16 anggota KTH diantaranya sudah tidak menjadi anggota lagi. Jatah lahan yang mereka peroleh ada yang dijual kepada orang lain atau diserahkan kepada saudaranya.

2. Pengurus yang dibentuk tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Walaupun pengurus telah dibentuk, tetapi KTH sendiri belum mempunyai peraturan rumah tangga sehingga pengurus sendiri tidak pernah mengetahui apa tugasnya.

3. Pertemuan rutin KTH tidak berjalan

Berdasarkan kesepakatan pada rapat anggota saat dibentuknya KTH ditetapkan pertemuan KTH diadakan sekali dalam selapan (35 hari). Namun kenyataannya, hal itu hanya berjalan beberapakali saja. Sejak pertengahan tahun 1987, yang berarti proyek ini baru berjalan setengah tahun, pertemuan-pertemuan KTH tersebut praktis tidak pernah terselenggara. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran anggota KTH di dalam melakukan kegiatan bersama, disamping kurangnya pembinaan dan bimbingan dari petugas yang berwenang.

4. Belum adanya pembinaan/penyuluhan secara rutin.

Disadari bahwa program Perhutanan Sosial merupakan hal yang baru. Namun demikian pengalaman Perum Perhutani dalam kegiatan "Prosperity Approach", MALU dan PMDH setidaknya dapat mempermudah pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Karena pada dasarnya program Perhutanan Sosial merupakan modifikasi dari PMDH dengan pola penyuluhan

intensif. Tujuannya pun kurang lebih sama, yaitu untuk membina masyarakat sebagai "mitra sejajar" di dalam pembangunan hutan atas dasar saling menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan Perum Perhutani sekaligus memperbaiki lingkungan serta menjaga kelestariannya.

Selama ini pembinaan/penyuluhan yang diberikan kepada KTH praktis sangat kurang, baik dari petugas lapangan maupun dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan lain-lain.

5. Belum adanya sistem kerja kooperatif

Secara sepintas antara petani peserta program Perhutanan Sosial dan petani tumpangsari (pada areal bukan rutin) tidak menunjukkan perbedaan dalam cara kerja mereka. Hal ini disebabkan karena fungsi kelompok belum berjalan sesuai yang diharapkan, bahkan sebagian besar dari anggota merasa terbebani dengan peraturan-peraturan yang ada.

Pola Agrohutani

Agrohutani adalah sistem manajemen hutan yang menerapkan pola penanaman campuran antara jenis-jenis tanaman hutan dan pertanian.

Pola agrohutani di pilot project RPH Ngantepan disesuaikan dengan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial budaya setempat (Lihat Lampiran 1). Kepentingan ekologi tampaknya mendapat prioritas di lokasi ini, mengingat kondisi lahan yang sangat kritis sehingga diperlukan usaha-usaha peningkatan kesuburan tanah yang lebih baik. Untuk memenuhi kepentingan ekologi tersebut pemilihan jenis tanaman menjadi sangat penting. Di lokasi pilot project RPH Ngantepan ditetapkan tanaman johar (*Cassia siamea* Lamk) sebagai tanaman pokok. Jarak tanam untuk tanaman johar 4 x 2 meter dengan pertimbangan kondisi lahan di lokasi proyek. Gambaran mengenai jenis tanaman yang diusahakan dalam pola agrohutani disajikan pada tabel 4.

Penanaman tanaman pokok di RPH Ngantepan berbeda dengan yang dilakukan di RPH Cepukan. Di RPH Ngantepan tanaman johar ditanam secara biji, sedangkan di RPH Cepukan ditanam secara koker (plances). Pelaksanaan penanamannya di RPH Cepukan dilakukan dengan sistem Cemplongan (potting system). Caranya dengan menggali/membuat lubang berukuran 50 x 50 x 50 cm dan diisi tanah endapan (wadek) dari bengawan solo. Cara ini untuk meng-

kondisi lahan yang berbatu. Di RPH Ngantepan cara ini tidak dilakukan.

Untuk menunjang fungsi konservasi lahan dibuat pola terasering dan pembuatan tanggul dari batu-batuan yang ada di lokasi secara swadaya oleh petani.

Tabel 4. Pola Agrohutani dan jenis tanaman yang diusahakan di pilot project Perhutanan Sosial RPH Ngantepan BKP Getas.

Pola Tanam	Jenis tanaman
1. Tanaman Pokok	johar (<i>Cassia siamea</i> Lamk)
2. Tanaman Sela	lamtoro (<i>Leucaena leucocephala</i>)
3. Tanaman Tepi	angka, jeruk purut
4. Tanaman Pagar	<i>Acacia arabica</i>
5. Tanaman Pengisi	sirsak, srikaya
6. Tanaman Penyangga	pepaya, randu
7. Tanaman Pangan	jagung, kedelai, ketela pohon, kacang hijau, wijen dan kacang tanah.

Berdasarkan hasil pengamatan, tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman pokok (johar) dinilai sangat rendah, yaitu kurang dari 50 persen. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang berbatu, sehingga akar tanaman tidak dapat masuk ke dalam tanah. Pada awalnya pertumbuhan tanaman johar cukup baik, tetapi setelah berumur 1.5 tahun tanaman mulai tampak kuning, kemudian mengering dan mati. Di samping itu juga disebabkan oleh serangan ulat, hingga sebagian tanaman johar tampak gundul. Hal yang sama terjadi untuk tanaman pengisi (sirsak dan srikaya), tingkat keberhasilannya hanya berkisar 5 sampai 10 persen. Sedangkan untuk tanaman sela (lamtoro) mendapat serangan kutu loncat, dan keadaannya cukup memprihatinkan.

Pertumbuhan yang sangat baik adalah untuk tanaman tepi (mangga, angka), tanaman pagar (*Acacia arabica*) dan tanaman penyangga (randu dan pepaya). Tingkat keberhasilannya dinilai di atas 90 persen.

Tanaman Pertanian dan Hasil Produksi

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, setiap anggota KTH mendapat lahan seluas satu andil (0.25 hektar). Luasan ini setelah dikurangi dengan tanaman pokok, tanaman sela dan tanaman pengisi, maka luas efektif yang dapat dipergunakan oleh petani untuk tanaman pertanian (palawija) hanya berkisar 0.15 hektar.

Jenis tanaman pertanian yang diusahakan ialah jagung, kedelai, ketela pohon, wijen, kacang hijau dan sedikit kacang tanah. Pola tanam tanaman pertanian di wilayah desa Pitu umumnya dan petani peserta proyek Perhutanan Sosial dan tumpangsari khususnya, terlihat adanya suatu pola yang sudah mantap. Dalam arti sudah bertahun-tahun dilakukan oleh petani. Pola tanam tersebut adalah sebagai berikut. Menjelang musim hujan antara bulan Agustus dan September, petani mulai dengan pengolahan tanah. Setelah hujan turun kira-kira awal bulan Oktober petani mulai menanam. Jenis tanaman yang diusahakan adalah jagung dengan diselingi tanaman ketela pohon dan wijen. Jagung dan wijen dipanen pada sekitar bulan Januari-Februari. Setelah jagung dan wijen, maka disusul dengan kedelai, yang dapat dipanen sekitar bulan Mei-Juni. Setelah panen kedelai, maka areal lahan menjadi kosong dan hanya menunggu panen ketela pohon yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus. Pengolahan selanjutnya umumnya petani menunggu musim hujan berikutnya. Perkembangan pola tanam untuk tanaman pangan di lokasi pilot project Perhutanan Sosial RPH Ngantepan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dengan pola tanam yang demikian, maka sejak dimulainya pada akhir tahun 1986 anggota KTH telah tiga kali panen jagung, dan dua kali panen kedelai. Dalam satu tahun rata-rata terdapat dua kali musim tanam, yang pertama; jagung, ketela pohon dan wijen, dan musim tanam kedua adalah kedelai dengan diselingi kacang hijau dan kacang tanah.

Jarak tanam untuk masing-masing tanaman yang diusahakan berbeda-beda dari anggota KTH yang satu ke lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan dari petugas, disamping mereka umumnya mempertahankan pengalaman selama bertahun-tahun dalam melakukan kegiatan tumpangsari.

Produksi tanaman pertanian di lokasi Perhutanan Sosial dinilai masih sangat rendah, terutama pada tahun pertama. Rata-rata produksi setiap andil (0.25 Ha) dikemukakan pada tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata produksi tanaman pertanian per-andil (0,25 Ha) di lokasi Perhutanan Sosial RPH Ngantepan.

Jenis Tanaman	Produksi tanaman (Kg)	
	1986/1987	1987/1988
1. Jagung	85	115
2. Kedelai	20	35
3. Ketela Pohon	120	175
4. Wijen	5	8
5. Kacang Hijau	3	5
6. Kacang Tanah	7.5	-

Rendahnya produksi pada tahun 1986/1987 disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : kondisi tanah belum matang, keterlambatan waktu tanam dan adanya serangan hama. Kegagalan tersebut mengakibatkan pihak Perum Perhutani membebaskan petani dari kewajiban membayar kredit sarana produksi yang diberikan. Pada tahun 1987/1988 keputusan jenis tanaman sepenuhnya diserahkan kepada petani. Produksi terlihat sedikit lebih baik, walaupun masih terdapat serangan hama yang cukup serius.

Rata-rata pendapatan petani pada tahun 1986/1987 sebesar Rp 47 825.-. Jumlah ini menyumbang 8.75 persen dari total pendapatan keluarga. Pada tahun 1987/1988 rata-rata pendapatan dari program Perhutanan Sosial mengalami peningkatan sebesar 49.35 persen menjadi Rp 71 425.- dan sumbangannya terhadap pendapatan keluarga meningkat menjadi 9.86 persen (lihat lampiran 3).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program Perhutanan Sosial di RPH Ngantepan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa kesadaran dan partisipasi anggota KTH dalam program masih rendah. Mereka ikut dalam program Perhutanan Sosial dengan maksud agar dapat secara bebas mengambil hasil hutan seperti : merencek, mengambil daun dan membuat arang.

2. Walaupun program Perhutanan Sosial telah berjalan selama dua tahun, namun belum mampu meningkatkan pendapatan petani anggota KTH secara nyata.
3. Belum terlihat adanya perbedaan yang nyata antara program Perhutanan Sosial dengan tumpangsari biasa, baik dari segi pola tanam maupun pemeliharaan tanaman.

ART OF LITERATURE.

Lampiran 2. Perkembangan Pola Tanam Tanaman Pangan
di Lokasi Perhutanan Sosial RPH Ngantepan

9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
/-----\						/-----\					
Jagung						Kedelai					
/-----\						/-----\					
W i j e n						K.Tanah/K.Hijau					
/-----\						/-----\					
ketela pohon											
-----						-----					
Musim penghujan						Musim Kemarau					
-----						-----					

Lampiran 3. Rata-rata pendapatan keluarga petani peserta proyek per tahun selama dua tahun di RPH Ngantepan.

Sumber Pendapatan	Tahun			
	1986/1987		1987/1988	
	Rp	%	Rp	%
Pertanian Desa				
- Sawah	137 400	25.14	138 000	19.06
- Tegalan/ pekarangan	46 500	8.50	84 600	11.68
- Ternak	75 000	13.72	85 000	11.74
Kehutanan				
- Perhutanan Sosial	47 825	8.75	71 425	9.86
- Tumpangsari biasa	33 000	6.04	54 000	7.46
- Pengambilan hasil hutan	91 000	16.65	156 000	21.54
Perdagangan dan Jasa				
	115 800	21.19	135 120	18.66
Total Pendapatan	546 525	100.00	724 145	100.00

DISKUSI SIDANG SEMINAR KE SATU

Penanya : Jejen

1. Dilihat langsung ke lapangan ternyata tanaman pokok agathis di lokasi pilot proyek 1986 tumbuh sangat baik (100%) sedangkan pada lokasi 1987 ternyata pertumbuhannya sangat jelek (60 %). Apakah ini disebabkan karena program tidak diterima oleh KTH atau ada sebab lain ?
2. Alternatif pola tanam agar program layak adalah : cabe rawit 0.3 Ha, padi gogo 0.2 Ha dan kacang dadap 0.0303 Ha. Apakah ini mungkin dilakukan, padahal tanaman pokok agathis sudah cukup rimbun, sedangkan jenis-jenis tanaman yang diajukan butuh cahaya (tidak tahan di bawah tegakan)?
3. Setelah kami melihat langsung ke lokasi dimana saudara meneliti, ternyata pendapatan KTH dari tanaman palawija terjadi penurunan drastis antara tahun 1987 dan 1988. Dikhawatirkan semakin lama semakin menurun, kira-kira menurut anda pada tahun ke berapa akan mendapatkan penghasilan yang optimal bagi KTH?

Jawab : Anny Ratnawati

1. Pertumbuhan yang kurang baik pada tahun 1987 disebabkan : 1) bibit belum siap tanam (masih terlalu kecil) ; 2) penanaman bibit damar dilakukan sudah pada akhir musim hujan (memasuki musim kemarau). Jadi pertumbuhan tanaman tahun 1987 yang kurang baik tersebut bukan disebabkan program yang tidak diterima KTH, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksiapan petugas Perum di lapangan.
2. Alternatif tersebut telah mempertimbangkan pengaruh naungan terhadap tingkat produksi dan luas areal efektif yang dapat ditanami.
3. Penurunan produksi palawija tersebut lebih disebabkan karena adanya musim kemarau yang panjang, sedangkan penghasilan optimal untuk tumpangsari akan dapat diterima petani selama tahun tanam tumpangsari tersebut (5 tahun).

Penanya : Reynold CH Manalu

1. Apa yang anda maksudkan dengan pernyataan " pada keadaan optimal tingkat penghasilan pesanggem lebih

tinggi (relatif) "? Apa kriteria optimal yang dimaksudkan? Supaya optimal bagaimana dengan desain agroforestry seharusnya?

Jawab : Anny Ratnawati

1. Yang dimaksud optimal adalah pendapatan petani maksimum dengan kendala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki petani. Desain agroforestry pada pola optimal : cabe rawit = 0.3 Ha; padi = 0.2 Ha; kacang dadap = 0.0303 Ha ditambah tanaman kehutanan dan tanaman buah-buahan.

Penanya : Jen Tatum

1. Dalam kurun waktu 40 tahun ada perubahan skenario usahatani (a.l. tanaman pangan akan berakhir). Sejahuh mana analisis anda mengakomodasi perubahan skenario ini.
2. Mengapa analisis finansial 40 tahun jika tanaman kayu (pokok) tidak merupakan sumber pendapatan petani? Siapa yang anda maksudkan dengan "target group" dalam analisis finansial?

Jawab : Anny Ratnawati

1. Dalam cash flow perubahan skenario tersebut sudah termasuk dalam analisis yang dilakukan.
2. Analisis finansial 40 tahun, berdasarkan pernyataan bahwa peserta dapat mengambil hasil buah-buahan selama daur hidup damar (40 tahun).

Penanya : Teguh Purwanto

1. Apakah pola tumpangsari optimal yang saudara sarankan sesuai pula dengan persepsi petani setempat ? Karena sering terjadi suatu pola layak di atas meja, tidak layak di lapangan jika dilihat dari situasi kondisi budaya petani setempat .

Jawab : Anny Ratnawati

1. Pola optimal tersebut sudah mempertimbangkan persepsi petani setempat. Sehingga saya optimis petani mau menerima pola tersebut.

Penanya : Ashadi Ruslan

1. Dalam penyajian makalah dikatakan akan terjadi waktu luang sehabis palawija tidak dapat ditanami lagi. Sejauhmana hal ini mempengaruhi pola sikap masyarakat dan bagaimana pemecahannya ?

Jawab : Togu Manurung

1. Kalau pendapatan petani peserta menurun drastis setelah tahun ketiga, maka kemungkinan petani peserta tersebut akan berkurang keterikatannya dengan usaha-usaha pemeliharaan hutan (bahkan mungkin dapat meninggalkan proyek dan melakukan tindakan yang mengganggu sumberdaya hutan). Pemecahannya adalah dengan menanam tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, cocok dengan lokasi dan cepat menghasilkan, sebelum tahun ketiga sehingga pada tahun keempat atau kelima sudah dapat memberikan hasil yang memadai atau bahkan lebih tinggi.

Penanya : Amirul Ilman

1. Dari penelitian anda bahwa satuan pengamatan adalah petani hutan. Padahal satu ciri yang membedakan Perhutanan Sosial dengan lainnya adalah adanya KTH. Bagaimana jika satuan penelitiannya adalah KTH ?

Jawab : Togu Manurung

1. Saya kurang setuju dengan pendapat Bapak. Menurut saya dalam hal ini KTH hanya sebagai wadah kelompok tani dan wadah pembinaannya. Pengamatan terhadap individu peserta akan lebih baik dan berguna. Kalau KTH-nya baik (pendapatan KTH tinggi) belum tentu pendapatan atau kesejahteraan per individu peserta otomatis juga baik. Karena bisa saja distribusi manfaat atau pendapatan diantara peserta dalam KTH tidak merata, sehingga lebih baik pengamatannya pada petani peserta proyek.

Penanya : Sanim Bunasor

1. Setelah 4 tahun dimana tumpangsari tanaman pangan sudah tidak ada lagi, darimana kebutuhan pangan petani dipenuhi (kaitannya dengan food security) bagaimana nasib petani selanjutnya ?
2. Bagaimana cara untuk mewujudkan pola usahatani optimal kepada petani dikaitkan dengan berbagai aspek yang melatarbelakangi petani (aspek sosio-kultural, ekonomi dll.) ?

Jawab : Togu Manurung

1. Kebutuhan pangan dipenuhi dari penghasilan lainnya (tahun keempat dst.) dari buah-buahan ditambah dengan pendapatan berburuh tani. Untuk meningkatkan pendapatan setelah tahun ketiga perlu ditanam tanaman bernilai ekonomis tinggi serta cepat menghasilkan sehingga pada tahun keempat dan seterusnya sudah mulai memberikan hasil bagi petani peserta proyek.
2. Dengan penjelasan dan penyuluhan langsung kepada petani peserta yang dalam hal ini pelaksanaannya dibantu oleh PLPS atau petugas Perum Perhutani setempat.

Penanya : Zoefri Hamzah

1. Apa perbedaan antara kelayakan ekonomi dan finansial?

Jawab : Togu Manurung

1. Kelayakan finansial bertujuan untuk mengetahui kelayakan proyek dari segi individu peserta proyek dalam hal ini menggunakan dasar harga yang berlaku setempat (market price) untuk perhitungan cash flow dan penentuan nilai-nilai kriteria investasinya (NPV, BCR dan IRR). Kelayakan ekonomi untuk mengetahui kelayakan proyek dari segi ekonomi (masyarakat secara luas). Dalam hal ini menggunakan dasar harga bayangan yang menggambarkan nilai produksi marginal dari suatu barang atau jasa (shadow price) sebagai dasar perhitungannya. Dalam hal ini biaya dan manfaat yang bersifat transfer dikeluarkan dari perhitungan (misal : pajak, subsidi).

Penanya : Adolf Siregar

1. Apa atau bagaimana saran anda terhadap efektifitas pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota KTH yang anda katakan masih rendah ?
2. Apakah anda turut meneliti tingkat organisasi KTH di tempat penelitian anda, dan bagaimana korelasinya terhadap pemberian motivasi anggota KTH yang belum efektif ?

Jawab : Achmad Rochani

1. Sebenarnya yang membedakan program Perhutanan Sosial dengan program-program sebelumnya adalah adanya pembinaan/penyuluhan yang intensif. Di RPH Ngantepan hal ini belum berjalan disamping itu perlu ditingkat-

kan peran PLPS, keterkaitan dengan instansi lain, pe-rangsang bagi petani dalam partisipasinya terhadap program Perhutanan Sosial.

2. Terlihat tingkat organisasi masih lemah, sehingga hal ini mengakibatkan pemberian motivasi anggota KTH belum efektif.

Penanya : Nirwan Siregar

1. Mohon penjelasan mengenai lahan garapan pada RPH yang diteliti. Apakah lahan sebelum ada proyek merupakan lahan tanpa tanaman atau pohon hutan? Apa bedanya dengan lahan pertanian biasa ? Kenapa tidak dilakukan penilaian sebelum ada usahatani dan sesudah ada usahatani ?

Jawab : Achmad Rochani

1. Lokasi pilot proyek Perhutanan Sosial di RPH Ngante-pan sebelumnya merupakan lahan kosong bekas tebanan tanaman jati sekitar tahun 1970 dan telah dilakukan beberapa kali reboasasi tetapi selalu mengalami kega-galan. Penilaian sebelum ada Perhutanan Sosial tidak dilakukan karena sangat sulit untuk mendapatkan in-formasi keadaan sebelum proyek, ketiadaan data yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu digunakan alternatif dalam penelitian ini " dengan dan tanpa proyek Perhu-tanan Sosial ".



KESIMPULAN DISKUSI SIDANG KE SATU

1. Terdapat dua macam pola, yaitu untuk lokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat.
2. Masih terdapat banyak masalah-masalah dan ada perbedaan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Gambaran yang cerah ada pada dua kasus di Jawa Barat dimana rencana dan pelaksanaan di lapangan sudah mulai bertemu.
3. Secara potensial, Social Forestry layak dilaksanakan terutama jika memakai pola optimal. Hal ini bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomis dan finansial.